

Analysis Of The Structure And Components Of Financial Reports Of Sharia Financial Institutions

Anita Dwi Utami^{1*}, Tiana Fenny Krisdina²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April
anitadwi.feb@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords:

PSAK 101,
Sharia
Financial
Statements,
BPRS

ABSTRACT

One of the sharia financial institutions that can provide financing to the community is the Sharia People's Credit Agency. The existence of Sharia People's Credit Agency has a specific objective, namely providing banking services and products for economically weak communities and small and micro businesses (SMEs) both in urban and rural areas. BPRS Harta Insan Karimah Cibitung (BPRS HIK Cibitung) is a People's Credit Agency which operates in the sharia sector using PSAK Syariah and PSAK ETAP. Sharia Financial Institutions exist as an alternative for Muslims for those who need capital and other financing to be free from gharar, maisir and usury. The components of financial statements according to PSAK 101 are 7 components. The research method used is descriptive analysis with the research object BPRS HIK Cibitung. Data analysis carried out in this research was through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the structure and components of financial report presentation at BPRS HIK Cibitung are in accordance with Sharia Financial Accounting Standards prepared by the Indonesian Accountants Association, namely PSAK 101 Concerning Financial Reports of Sharia Entities.



Copyright © 2023 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Anita Dwi Utami,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April,
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang Utara, Sumedang.
Email: anitadwi.feb@unsap.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi islam di Indonesia cukup pesat. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya lembaga keuangan syariah berkembang dimana-mana. Perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Sejak saat itu, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah cukup luas hingga saat ini. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking sistem yaitu bank konvensional yang mulai melirik dan membuka unit usaha syariah yang pelaksanaannya berpedoman pada prinsip syariah.

Selain lembaga keuangan syariah berkembang di Indonesia, bisnis-bisnis kecil yang disebut dengan UMKM pun telah banyak berkembang hingga saat ini. Namun, tentunya membuka usaha perlu adanya suntikan dana yang cukup besar sehingga UMKM membutuhkan pembiayaan dari luar. Banyak sektor UMKM yang berfikir pragmatis dalam pengambilan resiko meminjam modal. UMKM memilih jalan pintas dalam suntikan dananya melalui rentenir dan pinjaman online dengan suku bunga yang sangat tinggi. Di dalam Islam sendiri melarang transaksi yang gharar, maisir, dan juga mengandung riba. Riba sendiri jelas haram hukumnya, terlebih hal tersebut tertuang jelas dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an. Riba merupakan larangan utama dalam transaksi muamalah dan Allah SWT telah mengharamkan riba. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Lembaga Keuangan Syariah hadir sebagai alternatif umat Islam bagi yang membutuhkan modal serta pembiayaan lainnya agar terbebas dari gharar, maisir, dan riba. Dalam Lembaga keuangan syariah tidak dikenal dengan yang namanya sistem bunga, tetapi lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Karena sistem bunga mengharuskan nasabah kredit harus tunduk dan patuh pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga secara sepihak oleh pihak bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Padahal dalam ajaran Islam, dalam bertransaksi muamalah harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, sistem pembiayaan pada lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil dan porsi bagi hasil berdasarkan nisbah (kesepakatan bersama) berlaku sama, sesuai akad di awal hingga masa berakhirnya akad atau perjanjian pembiayaan.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat memberi pembiayaan kepada masyarakat adalah Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil dan mikro (UKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan. BPRS pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1991 di Jawa Barat. Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

Akuntansi syariah harus dapat menyajikan laporan keuangan yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan perintah (kewajiban) dari Tuhan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memperhitungkan kewajiban zakat secara benar dalam tinjauan syariah, juga tidak menimbulkan kerugian pihak-pihak yang terkait dengan informasi laporan keuangan. Untuk mewujudkan hal ini keterikatan kepada syariah adalah hal yang utama walaupun disisi lain akuntansi syariah juga harus memenuhi Standar Akuntansi (Andini & Norsain, 2011). Standar akuntansi yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip syariah adalah PSAK 101 Tentang Laporan Keuangan Entitas Syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amelia et al., 2021) bahwa pada BPRS Mentari Pasaman Saiyo pada Laporan Neracanya belum menyajikan pendapatan murabahah tanggungannya, begitupula hasil penelitian dari (Sari et al., 2023) bahwa pada BPRS Al-Washliyah tidak mencatat penyusutan dalam laporan neracanya.

BPRS Harta Insan Karimah Cibitung (BPRS HIK Cibitung) merupakan salah satu Badan Perkreditan Rakyat yang bergerak di bidang syariah menggunakan PSAK Syariah dan PSAK ETAP sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis penelitian dengan judul “Analisis Struktur Dan Komponen Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPRS HIK Cibitung)”.

2. LANDASAN TEORI

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi terus menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Deegan & Craig, 2002). Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. (Hadi, 2011). BPRS diharuskan terus berinteraksi dengan masyarakat agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, jadi jika semakin tinggi kepercayaan dari masyarakat maka akan terjadi peningkatan pada dana syirkah temporer disebabkan masyarakat percaya untuk menyalurkan dan memanfaatkan pembiayaan pada BPRS tersebut.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Berbagai tindakan tersebut tidak lain adalah proses akuntansi yang pada hakikatnya merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan peristiwa, yang setidak-tidaknya sebagian bersifat finansial, dalam cara yang tepat dan dalam bentuk rupiah dan penafsiran akan hasil-hasilnya.

3. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Menurut (Nurhayati & Wasilah, 2019), tujuan penyusunan laporan keuangan syariah oleh entitas syariah antara lain:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf

4. Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Penyajian laporan keuangan syariah memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan penyajian laporan keuangan konvensional. Dalam laporan keuangan syariah, penyajian unsur-unsur laporan keuangan diklasifikasikan menurut hakekat atau fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi (Wiroso, 2011). Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017), laporan keuangan yang lengkap dari entitas syariah terdiri dari :

1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. laporan arus kas selama periode;
5. laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
6. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode; dan
7. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.

Pendapat berbeda mengenai komponen Laporan Keuangan Syariah dikemukakan oleh (Nurhayati & Wasilah, 2019), bahwa komponen laporan keuangan syariah ada 9, yaitu :

1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. laporan arus kas selama periode;
5. laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
6. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
7. catatan atas laporan keuangan;
8. laporan perubahan dana investasi terikat; dan
9. laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Objek penelitiannya yaitu BPRS HIK Cibitung. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data tersebut diambil dari Laporan BPRS HIK Cibitung tahun 2021 yang dipublikasikan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Penulis mengumpulkan data-data atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BPRS HIK Cibitung melakukan serangkaian proses pencatatan data transaksi dan membuat laporan keuangan sebagai berikut (BPRS HIK Cibitung, 2021):

1. Laporan Posisi Keuangan
 - a. Aset
Pada sisi aset, BPRS mengungkapkan adanya pos seperti kas, piutang, pembiayaan, pinjaman qardh, aset tetap, dan aset lain-lain.
 - b. Liabilitas
Pada sisi liabilitas, BPRS mengungkapkan adanya pos seperti kewajiban bagi hasil, utang pajak, dan kewajiban lain-lain.
 - c. Dana Syirkah Temporer
Pada sisi Dana Syirkah Temporer, BPRS mengungkapkan adanya pos tabungan dan deposito.
 - d. Ekuitas
Pada sisi ekuitas, BPRS mengungkapkan adanya pos modal saham, agio saham, laba ditaha, dan laba tahun berjalan.
2. Laporan Laba Rugi
Pada Laporan Laba Rugi, BPRS mengungkapkan pos pendapatan serta beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan selama menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun, BPRS tidak memiliki pendapatan atas komprehensif lain. Jadi BPRS hanya membuat Laporan Laba Rugi. Pada Laporan Laba Rugi BPRS mencantumkan pendapatan yang didapatkan dari kegiatan operasi utama dan operasi lainnya. Kegiatan tersebut adalah dari hasil memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan sistem bagi hasil dan juga margin. Selain itu, BPRS juga mengungkapkan bahwa adanya pemotongan atas laba hasil usahanya untuk menunaikan zakat.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Pada Laporan Perubahan Ekuitas, BPRS mengungkapkan tambahan modal disetor, laba tahun berjalan, serta dividen. Laporan Perubahan ekuitas ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan suatu periode pada BPRS HIK Cibitung.
4. Laporan Arus Kas
Pada Laporan Arus Kas, BPRS membagi ke dalam tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dalam penyajian laporan arus kas ada 2 metode yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Metode yang digunakan BPRS HIK Cibitung dalam melakukan penyajian laporan arus kas adalah menggunakan metode tidak langsung.
5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil
Laporan ini dibuat untuk mengetahui kebenaran pendapatan yang nyata-nyata diterima oleh lembaga keuangan syariah yang merupakan pendapatan yang dibagi hasilkan dengan pemilik dana. Pada BPRS HIK Cibitung mengungkapkan bahwa adanya pendapatan dari kegiatan operasional perbankan, dan selanjutnya pendapatan tersebut dibagi menjadi hak bagi hasil untuk bank dan hak bagi hasil untuk pemilik dana.
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
BPRS HIK Cibitung menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan ini menyajikan pos sumber-sumber dana zakat yang diterima oleh bank misalnya seperti zakat dari keuntungan bank, zakat karyawan, dan zakat dari pihak lainnya. Selanjutnya diungkapkan juga penyaluran atau penggunaan dana zakat tersebut dirincikan kepada siapa dan digunakan untuk apa.
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Laporan ini BPRS HIK Cibitung gunakan bilamana terdapat pendapatan dari kegiatan non-halal, maka dimasukkan dalam laporan ini. Selain itu, disajikan juga penyaluran dan penggunaan sumber dari dana kebajikan ini.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan

9. BPRS HIK Cibitung membuat Catatan Atas Laporan Keuangan guna memberikan informasi yang lebih rinci dan lebih jelas. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama

2. Pembahasan

No	BPRS HIK Cibitung	PSAK 101	Ket.
1.	Unsur Laporan Neraca berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan. BPRS menyajikan dalam Laporan Neraca pos-pos Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas.	Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut: (paragraf 71) : (a) Aset (b) Kewajiban (c) Dana syirkah temporer (d) Ekuitas	Sesuai
2.	Unsur Laporan Laba Rugi BPRS HIK Cibitung menyajikan pos-pos pendapatan dan beban dari hasil operasional utama dan operasional lainnya yang dilaksanakan BPRS.	Unsur Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lainnya yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban (paragraf 96).	Sesuai
3.	Unsur Laporan Perubahan Ekuitas BPRS HIK Cibitung menyajikan pos Tambahan modal disetor, dividen, dan laba bersih tahun berjalan.	Dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dijelaskan bahwa entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama Laporan Keuangan, yang menunjukkan: (paragraf 61 -62) (a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan; (b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya (c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi (d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; (e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan (f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.	Sesuai
4.	Laporan Arus Kas yang disusun oleh BPRS HIK Cibitung diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.	Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait yaitu PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (paragraf 9).	Sesuai

No	BPRS HIK Cibitung	PSAK 101	Ket.
5.	Pada Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil, BPRS HIK Cibitung mengungkapkan bahwa adanya pendapatan dari kegiatan operasional perbankan, dan selanjutnya pendapatan tersebut dibagi menjadi hak bagi hasil untuk bank dan hak bagi hasil untuk pemilik dana.	Menurut PSAK 1010 tujuan pembuatan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil ini antara lain untuk mengetahui kebenaran pendapatan yang nyata-nyata diterima (cash basis) yang diterima oleh Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan pendapatan yang dibagi hasilkan dengan pemilik dana.	Sesuai
6.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat pada BPRS HIK Cibitung pos sumber dana zakat seperti berasal dari zakat keuntungan bank, karyawan, zakat dari pihak luar. Dan untuk penyalurannya disalurkan oleh lembaga pihak lain dan disalurkan sendiri.	Dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dijelaskan (paragraf 64 – 68) bahwa entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama Laporan Keuangan, antara lain yang menunjukkan dana zakat berasal dari wajib muzaki dan penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat.	Sesuai
7.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada BPRS HIK Cibitung disajikan pos sumber dana kebajikan berasal dari denda, pendapatan non-halal, infak dan sedekah, serta dana sosial lainnya. Sedangkan dalam penyalurannya digunakan untuk sumbangan dan yang lainnya.	Dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dijelaskan (paragraf 69 -73) bahwa entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama Laporan Keuangan, antara lain Sumber Dana Kebajikan (berasal dari infak, sedekah, pendapatan non-halal, denda) dan penggunaan dana kebajikan (sumbangan dan penyaluran lainnya).	Sesuai
8.	Catatan Atas Laporan Keuangan pada BPRS HIK Cibitung berbentuk penjelasan naratif. Dalam Laporan tersebut diungkapkan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh BPRS dan pos-pos lain yang tidak diungkapkan dalam setiap laporan keuangan utama. Contohnya seperti rincian pembiayaan. Jika pada laporan neraca pembiayaan hanya berjumlah seluruhnya, di dalam catatan atas laporan keuangan dirincikan pembiayaan tersebut disalurkan kepada siapa dan berapa tahun jangka pembiayaannya. Dan juga pada laporan ini diungkapkan kebijakan baru mengenai dampak pandemi covid-19 yang menjadi perubahan pada kegiatan operasional BPRS.	Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut: a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. c. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.	Sesuai
9.	Penyajian komponen Laporan Keuangan BPRS HIK Cibitung adalah Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Laporan Sumber dan	Penyajian komponen Laporan Keuangan Bank Syariah berdasarkan PSAK 101 terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Pendaptan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil,	Sesuai

No	BPRS HIK Cibitung	PSAK 101	Ket.
	Penggunaan Dana Zakat, Catatan Atas Laporan Keuangan	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Catatan Atas Laporan Keuangan	

Sumber : data diolah penulis (2023)

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa struktur dan komponen penyajian laporan keuangan pada BPRS HIK Cibitung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK 101 Tentang Laporan Keuangan Entitas Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, F., Rahmad, M., & Putra, M. D. (2021). Analisis Penyajian Psak 101 Pada Laporan Keuangan Pt. Bprs Mentari Pasaman Saiyo. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSyA)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2696>
- Andini, I. Y., & Norsain. (2011). Pendapatan Bagi Hasil Dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Bank Syariah. *"PERFORMANCE"bisnis&akuntansi*, 3(1), 12–30.
- BPRS HIK Cibitung. (2021). *Laporan Tahunan*. <https://hikcibitung.co.id/investor-relationship/annual-report/>
- Deegan, & Craig. (2002). The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures- a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accounting Journal*, 15(3), 282–311.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Salemba Empat.
- Sari, R. D., Sitorus, E. A., & Handayani, N. (2023). Analisis Penyajian PSAK 101 Pada Laporan Keuangan PT. BPRS Al Washliyah. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1723–1735.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Wiroso. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah. In *Ikatan Akuntan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).